

**Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
(Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar)**

**Evaluation the Program of KOTAKU (City Without Slums)
(Study at Mariso Districts, Mariso Village, Makassar City)**

Mega Utami Putri, Muhammad Nur Yamin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email: nuryamin@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar, dan dampak dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis menurut Spradley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar) pelaksanaannya kurang baik sesuai dengan konsep dari Edward A. Suchman. Indikator yang tidak berjalan dengan baik ialah : a. tujuan program, b. analisis masalah, c. pengukuran perubahan, d. perubahan terhadap akibat dari kegiatan, e. dampak program. Adapun indikator yang berjalan dengan baik yaitu deskripsi dan standarisasi. Dampak dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tidak semua masyarakat dapat merasakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Mariso. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara infrastruktur menyebabkan kurang berhasilnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kata Kunci : *Evaluasi Program, Kota Tanpa Kumuh, Penanganan Permukiman Kumuh.*

ABSTRACT

This study aims to determine the evaluation of the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) at Mariso Districts, Mariso Village, Makassar City, and the impact of the implementation of the Slumless City Program (KOTAKU) at Mariso Districts, Mariso Village, Makassar City. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this study used the analysis model according to Spradley. The results of this study indicate that the implementation of the KOTAKU (City Without Slums) Program Evaluation (Study at Mariso Districts, Mariso Village, Makassar City) is not implemented well in accordance with the concept of Edward A. Suchman. Indicators that do not work well are: a. program objectives, b. problem analysis, c. measurement of change, d. changes to the consequences of activities, e. program impact. The indicators that run well are description and standardization. The impact of the City Without Slums Program (KOTAKU) is that not all people can feel the infrastructure development in Mariso Village. The lack of community participation in maintaining infrastructure has made the City Without Slums (KOTAKU) Program less successful.

Keywords: *Program Evaluation, City without Slums, Handling of Slum Settlement.*

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan, dimana permukiman kumuh terus berkembang dari tahun ke tahun apabila tidak ditangani oleh pemerintah secara menyeluruh dan tepat sasaran (Setiawan et al., 2021). Pertumbuhan dan perkembangan penduduk memerlukan sarana dan prasarana dasar, agar tidak mengakibatkan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh pada wilayah perkotaan.

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang kotor dengan berbagai permasalahan kota yang tidak layak huni, yaitu kepadatan bangunan yang sangat tinggi dengan luas wilayah yang terbatas, jalanan yang rusak, drainase yang tidak berfungsi, dan rendahnya kualitas bangunan (Rahmawati, 2018).

Menurut Nurhasanah (2019), pemerintah dalam menangani permukiman kumuh membuat suatu program yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Tujuan umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, untuk mendukung terwujudnya permukiman

perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan (Nasution, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, bahwa kriteria kekumuhan terdiri dari bangunan gedung, jalanan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 826/653.2/Tahun 2018, Kota Makassar memiliki tiga kategori kumuh yaitu kategori kumuh berat, kategori kumuh sedang, dan kategori kumuh ringan.

Kecamatan Mariso berada di kawasan dengan kategori kumuh berat di tengah kota yang berada di dataran rendah. Berdasarkan data permukiman kumuh di Kecamatan Mariso, luas permukiman kumuh baik itu kategori kumuh berat, kategori kumuh sedang, dan kategori kumuh ringan, dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Permukiman Kumuh Kecamatan Mariso

| No | Kelurahan | 2014 | 2018 |
|----|----------------|---------|---------|
| 1 | Bontorannu | 6,74 Ha | 5,1 Ha |
| 2 | Kampung Buyang | 2,81 Ha | 2,81 Ha |
| 3 | Kunjung Mae | 4,57 Ha | 4 Ha |
| 4 | Lette | 3,51 Ha | 3,51 Ha |
| 5 | Mario | 1,68 Ha | 1,68 Ha |

Dari data tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso pada tahun 2014 memiliki wilayah kumuh seluas 3,68 Ha, sedangkan pada tahun 2018 Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso memiliki wilayah kumuh seluas 1,68 Ha, dan mengalami penurunan wilayah kumuh seluas 2 Ha. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso masih berada pada kategori kumuh berat.

Dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mariso mempunyai sejumlah permasalahan yaitu, kondisi bangunan yang padat, jalanan yang berlubang, tidak terpeliharanya drainase, sistem persampahan yang kurang baik, pengelolaan air limbah yang belum memadai, dan belum adanya proteksi kebakaran.

Berbagai masalah dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh Shinta Arista Lamsi (Lamsi, 2019) yang berjudul Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah

berjalan dengan baik, meskipun belum maksimal dan belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan yang merata.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dijelaskan sebelumnya dimana perbedaannya terletak pada variabel, lokus, dan teori yang digunakan. Berangkat dari beberapa teori, opini, dan penelitian sebelumnya maka peneliti ingin meneliti Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi Dikecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Nugroho (2003, p. 65) mendefinisikan “Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan, dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara serampangan, dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi”. Handoyo (2012, p. 9) dan Putri (2021) mendefinisikan bahwa “Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”.

Akib (2016) mendefinisikan bahwa “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan pemerintah yang mengarah pada tujuan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah.

Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Meutia (2017) mendefinisikan bahwa “Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya”.

Edward A. Suchman (dalam Wicaksana 2017) mengemukakan “Enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu: tujuan program, analisis masalah, deskripsi dan standarisasi, pengukuran perubahan, perubahan terhadap akibat dari kegiatan, dampak program. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan program. Kegiatan yang terlebih dahulu dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis masalah. Dilakukan dengan menentukan masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah.

3. Deskripsi dan standarisasi. Dilakukan untuk mengetahui standar yang telah ditetapkan dengan keadaan yang ada dilapangan.
4. Pengukuran perubahan. Melakukan pengukuran perubahan yang bertujuan untuk mengetahui tingkatan perubahan yang terjadi dari suatu program.
5. Perubahan terhadap akibat dari kegiatan. Dengan menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Dampak program. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak dari program.

Dari beberapa konsep evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, penelitian ini menggunakan konsep evaluasi kebijakan oleh Suchman (1968), karena konsep tersebut lebih relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang mencakup 6 langkah yaitu, tujuan program, analisis masalah, deskripsi dan standarisasi, pengukuran perubahan, perubahan terhadap akibat dari kegiatan, dan dampak program.

Konsep Permukiman Kumuh Pengertian Permukiman

Permukiman sering disebut perumahan, begitu pula sebaliknya. Perumahan merupakan kumpulan

rumah yang terdiri dari prasarana dan sarana lingkungan (Handryant, 2012).

Pengertian Kumuh

Secara umum kumuh menggambarkan sikap, tingkah laku, standar hidup, dan penghasilan kelas menengah. Kumuh diartikan sebagai cap yang diberikan oleh golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan (Khotimah & Ellsadayna (2014); Handryant, (2012)).

Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jendral Cipta Karya tahun 2015-2019.

Adapun indikator outcome yang akan dicapai dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (antara lain: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, proteksi kebakaran).
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.

3. Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) ditingkat kabupaten/kota untuk mendukung program kota tanpa kumuh (KOTAKU).
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), peneliti menggunakan konsep evaluasi kebijakan publik dari Suchman (1968). Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat dari enam langkah dalam evaluasi kebijakan yang peneliti gunakan sebagai pedoman penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan Program

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mariso kurang baik dalam pelaksanaannya. Dengan berbagai tahapan telah dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, sosialisasi masyarakat, pemberian edukasi kepada masyarakat dan penegakan aturan. Namun dalam hal penegakan aturan belum berjalan dengan baik. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam peningkatan kualitas permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

b. Analisis Masalah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam analisis masalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mariso kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tujuh indikator masalah kekumuhan yaitu bangunan gedung, jalanan lingkungan, penyedia air minum, drainase lingkungan, pengelola air limbah, pengelola persampahan, dan proteksi kebakaran. Dari tujuh indikator kekumuhan di Kelurahan Mariso hanya tiga indikator yang berjalan yaitu pembangunan drainase, pembangunan jalan, dan pembangunan jembatan yang menghasilkan perubahan di Kelurahan Mariso, namun belum

menjawab permasalahan kekumuhan secara keseluruhan.

c. Deskripsi Dan Standarisasi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam deskripsi dan standarisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mariso sudah baik dalam pelaksanaannya. Terwujudnya infrastruktur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ialah enam puluh hari kerja atau dua bulan kerja. Jika lebih hal tersebut disebabkan karena cuaca buruk. Sikap dari agen pelaksana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah transparansi dan akuntabilitas.

d. Pengukuran Perubahan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pengukuran perubahan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mariso masih kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan data luas permukiman kumuh dari tahun 2014 sampai tahun 2021 luas permukiman kumuh menurun. Pada tahun 2021 Di Kelurahan Mariso sudah masuk dalam kategori tidak kumuh. Namun hal tersebut berbeda dengan hasil observasi peneliti yang masih menemui indikator kekumuhan diberbagai wilayah Di Kelurahan Mariso. Jadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah dapat mengurangi luas permukiman kumuh walaupun masih didapati beberapa wilayah yang belum terlaksana indikator kekumuhannya, dan belum

menjawab permasalahan kekumuhan secara keseluruhan.

e. Perubahan Terhadap Akibat Dari Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam perubahan terhadap akibat dari kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mariso kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan faktor komunikasi diantara fasilitator dan pihak Kelurahan yang kurang maksimal, dan perubahan terhadap permukiman kumuh Di Kelurahan Mariso bukan satu-satunya akibat dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tetapi ada program lain yang dapat merubah permukiman kumuh. Adapun program tersebut ialah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Penyedia Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), dan Dana Kelurahan.

f. Dampak Program

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mariso kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat dapat merasakan pembangunan infrastruktur Di Kelurahan Mariso. Hasil dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) kurang berhasil karena Di Kelurahan Mariso masuk dalam permukiman padat penduduk yang menyebabkan

sulitnya merubah permukiman kumuh tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembangunan di Kelurahan Mariso dalam menjaga fasilitas infrastruktur yang telah dibangun oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar) pelaksanaannya kurang baik berdasarkan konsep evaluasi kebijakan Edward A Suchman sebagaimana yang telah disimpulkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator yang kurang baik dalam pelaksanaan evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mariso ialah tujuan program, analisis masalah, pengukuran perubahan, perubahan terhadap akibat dari kegiatan, dan dampak program. Adapun indikator yang berjalan dengan baik yaitu deskripsi dan standarisasi.
2. Dampak dari Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar) tidak

semua masyarakat dapat merasakan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Mariso. Hasil dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) kurang berhasil karena Di Kelurahan Mariso masuk dalam permukiman padat penduduk, yang menyebabkan sulitnya merubah permukiman kumuh tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembangunan di Kelurahan Mariso dalam menjaga fasilitas Infrastruktur yang telah dibangun oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Implikasi

Hasil penelitian ini terkait Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar) merupakan salah satu bukti ilmiah akan pentingnya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Mariso demi mewujudkan pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen, dengan membangun Platform kolaborasi dengan berbagai pihak.

Saran

1) Bagi Pemerintah Kelurahan Mariso

Diharapkan pemerintah Kelurahan Mariso dapat membangun komunikasi yang harmonis antara pihak Kelurahan Mariso dengan pihak fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Adanya kerjasama antara pihak Kelurahan dengan tim pelaksana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam pelaksanaan dan pemeliharaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

2) Bagi Tim Pelaksana

a. Diharapkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat meningkatkan kinerja, dan dapat membangun motivasi masyarakat Di Kelurahan Mariso. Hal tersebut agar dapat mencapai tujuan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

b. Diharapkan dapat membangun kolaborasi dengan pihak swasta agar anggaran dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertambah, sehingga seluruh wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Mariso dapat diberikan bantuan infrastruktur.

3) Bagi Masyarakat Kelurahan Mariso

Diharapkan masyarakat di Kelurahan Mariso dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mariso. Karena pada dasarnya, jika seluruh masyarakat di Kelurahan Mariso bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), maka program tersebut dapat berjalan dengan baik.

dan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Tahun 2019).

Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA).

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.

Nasution, M. (2019). *Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.*

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Handryant, A. N. (2012). Permukiman Kumuh, Sebuah Kegagalan Pemenuhan Aspek Permukiman Islami. *Journal of Islamic Architecture*, 1(3).

Nurhasanah, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(1), 58–70.

Khotimah, C., & Ellsadayna, T. N. (2014). Profil Lingkungan Kumuh Terhadap Perilaku Penghuni dalam Teori Ekologi-Bronfenbrenner (Studi Kasus di Pemukiman Kumuh Pacar Keling Surabaya). *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 5(2), 139–162.

Putri, R. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto*. Universitas Hasanuddin.

Lamsi, S. A. (2019). *Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Peningkatan*

Rahmawati, A. (2018). *Aplikasi SWOT Di Kawasan*

Permukiman Kumuh (Kelurahan Biring Romang). *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia*, 3, A042-050.

Setiawan, D., Argenti, G., & Rizki, M. F. (2021). Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 52–68.

Kategori Kumuh Kota Makassar, (2018).

Suchman, E. (1968). *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Progr.* Russell Sage Foundation.

Wicaksana, H. H. (2017). Responsivitas dan Ketepatan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak. *Laboratorium Administrasi Publik 2017*, 47.